

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek bantuan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983).
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Aminah, Siti, "*Panduan Bantuan Hukum di Indoensia*". (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- AUSAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009).
- Kadji, Yulianto *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, JEBI No. 1 Tahun VII Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta.
- Hanitjo Soemitro, Roni. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Loekman, Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. (Yogyakarta : Kanisius, 2010)
- Simanjuntak, Nicolas, *Pemerintah di Ranah Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004).
- Sujamto, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1993).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002).
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004)

Winarta, Frans Hendra, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3. Jurnal

Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020, halaman 412.

Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diversi* 4, Nomor 2, 2018, halaman 9.

Deborah L Rhode. "*Acces to Justice*" *Oxford Universtiy Press* Volume 3, halaman 1.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* bagi Orang Miskin", *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, halaman 191-192.

MR. Aridayandi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan ke 48*, Nomor 3, Volume 3, Tahun 2018, halaman 1.

M. Susanto, “Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Unpad*, Volume 3, Tahun 2015, halaman 2.

Suyogi Imam dan Inge Puspita, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to law and Justice* Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret, 2018, halaman 52.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 1796 /UN7.5.1.2/DL/2021
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

09 DEC 2021

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Up Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 9
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Savitri Prastuti Dewi
NIM : 11000118120071
alamat : Jalan Bukit Dahlia Raya B319, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang
nomor HP : 082219157214
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
waktu pelaksanaan : 20 Desember 2021 – 28 Januari 2022

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

2. Surat Jawaban dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH	
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kodepos 50243 Telepon: (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 8311265 laman www.jatengprov.go.id	
Semarang, 21 Desember 2021	
Nomor : 410/0017294/2021	Kepada Yth. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di-
Lampiran : Sifat : Hal : Permohonan Riset/ Penelitian	SEMARANG
Menunjuk surat Saudara tanggal 9 Desember 2021 Nomor 11576/UN7.5.1.2/DL/2021 hal Permohonan Riset/ Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :	
1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan izin penelitian mahasiswa Saudara di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, atas nama : Nama : Savitri Prastuti Dewi NIM : <u>11000118120071</u> Prodi : SI Fakultas Hukum	
2. Mahasiswa tersebut akan mengadakan penelitian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya pada tanggal 20 Desember 2021 s.d 28 Januari 2022	
Demikian untuk menjadikan maklum.	
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ASISTEN ADMINISTRASI u.b. KEPALA BIRO ORGANISASI  Dr. <u>IS ETYAN SINDRAJAT, MM</u> * Pembina Utama Madya NRP. 19641104 198903 1 013	
TEMBUSAN : 1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Bapak Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah; 3. <u>Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.</u>	